

DETERMINASI ALGORITMA DAN POLARISASI OPINI PUBLIK: ANALISIS PERILAKU INFORMASI PADA TATA KELOLA PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Muhammad Haikal¹, Zayyin Abdul Quddus², Hendika Dwinanda Wicaksana³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email Korespondensi: hendikawicaksana@upnvj.ac.id

Email: mhaikal@upnvj.ac.id; zayyin_abdul@upnvj.ac.id; hendikawicaksana@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The transformation of digital technology has radically altered the patterns of public information behavior. Social media platforms no longer operate merely as transmission mediums, but as technological structures dictating the consumption of public discourse. This study aims to analyze the influence of recommendation system algorithmic determinism on the construction of public opinion polarization regarding governance metrics and access policies (the Jaklitera system) at the Jakarta Library. Through a literature review approach within information systems science, this study dissects how algorithmic engineering intervenes in the public's information encountering and receiving phases. The literature synthesis indicates that algorithms operate as conflict architects, constructing two isolated narrative bubbles through filter bubble and echo chamber mechanisms. Citizen information behavior is divided into a pro-order pole driven by civic fatigue, and a pro-accessibility pole that responds to policies as administrative repression, while institutional arguments regarding carrying capacity are organically shadowbanned. This phenomenon proves that urban governance issues have been distorted into social segregation due to information behavior dysfunction commodified by platform metrics. The implications of this study assert that to realize inclusive governance, public institutions must evaluate the resilience of their information system architectures against technological determinism that capitalizes on opinion fragmentation.

Keywords: Digital governance; Information behavior, Jakarta library.

ABSTRAK

Transformasi teknologi digital telah mengubah pola perilaku informasi (*information behavior*) masyarakat secara radikal. Platform media sosial tidak lagi beroperasi sekadar sebagai medium transmisi, melainkan sebagai struktur teknologi yang mendikte konsumsi wacana publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinasi algoritma sistem rekomendasi terhadap konstruksi polarisasi opini publik terkait metrik tata kelola dan kebijakan akses (sistem Jaklitera) di Perpustakaan Jakarta. Melalui pendekatan studi literatur pada ilmu informasi, kajian ini membedah bagaimana rekayasa algoritma mengintervensi fase penemuan dan penerimaan informasi masyarakat. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa algoritma beroperasi sebagai arsitek konflik yang mengonstruksi dua gelembung narasi terisolasi melalui mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber*. Perilaku informasi warga terbelah menjadi kutub pro-ketertiban yang digerakkan oleh kelelahan sipil (*civic fatigue*), dan kutub pro-aksesibilitas yang merespons kebijakan sebagai represi administratif, sementara argumen institusional terkait daya dukung bangunan justru ditenggelamkan (*shadowbanned*). Fenomena ini membuktikan bahwa isu tata kelola kota telah terdistorsi menjadi segregasi sosial akibat disfungsi perilaku informasi yang dikomodifikasi oleh metrik platform. Implikasi kajian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, institusi publik harus mengevaluasi resiliensi arsitektur sistem informasinya dalam menghadapi determinasi teknologi yang mengapitalisasi fragmentasi opini.

Kata kunci: Tata kelola digital, Perilaku informasi, Perpustakaan Jakarta.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola perilaku informasi secara radikal, melahirkan apa yang disebut sebagai masyarakat informasi (*information society*) di mana ruang publik tidak lagi terbatas pada dimensi fisik. Penelitian Arum & Marfianti (2021) menjelaskan bahwa ruang publik telah meluas secara masif ke dimensi digital melalui media sosial. Akibatnya, setiap kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah di dunia nyata dengan cepat dievaluasi, dikritik, dan didebatkan oleh masyarakat secara seketika (*real-time*) di dunia maya. Pergeseran ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya cakap dalam mengelola fasilitas fisik, tetapi juga tanggap terhadap dinamika opini yang bergerak liar di ruang digital (Karya & Rahman, 2026).

Salah satu fenomena yang paling representatif dalam menggambarkan kondisi ini di wilayah DKI Jakarta, di mana respons publik terhadap kebijakan pengelolaan pasca-revitalisasi Perpustakaan Jakarta di kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM). Wajah baru perpustakaan yang modern, estetik, dan inklusif berhasil menarik animo kunjungan warga yang sangat tinggi. Untuk merespons lonjakan minat tersebut sekaligus menjaga ketertiban dan merawat fasilitas, pihak pengelola memberlakukan serangkaian kebijakan administratif yang baru. Kebijakan ini meliputi kewajiban mendaftar keanggotaan dan melakukan reservasi daring melalui sistem Jaklita, pemberlakuan pembatasan kuota pengunjung harian, hingga aturan ketat mengenai larangan makan minum dan pembatasan aktivitas tertentu, seperti larangan menjadikan perpustakaan semata-mata sebagai studio foto. Langkah administratif ini secara natural melahirkan dua kutub opini yang saling berbenturan: kelompok pro-kebijakan yang berfokus pada ketertiban dan preservasi fasilitas, serta kelompok kontra-kebijakan yang menuntut kemudahan akses dan memandang perpustakaan seharusnya menjadi ruang terbuka tanpa hambatan birokrasi digital.

Perdebatan mengenai tata kelola fasilitas kota ini berlangsung sengit di berbagai platform digital seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram. Namun, persoalan mendasar muncul karena arsitektur informasi di platform-platform tersebut tidak beroperasi secara netral. Media sosial digerakkan oleh algoritma sistem rekomendasi yang dirancang khusus untuk mempersonalisasi konten demi memaksimalkan tingkat keterlibatan (*engagement*) pengguna. Algoritma ini secara aktif memengaruhi sirkulasi informasi melalui penciptaan (*filter bubble*) yang menyajikan konten hanya berdasarkan preferensi historis pengguna, serta membentuk (*echo chamber*) di mana masyarakat berkumpul dalam kelompok yang homogen (Rhodes, 2022). Di dalam ruang tersebut, mereka terus memvalidasi opini satu sama lain sehingga menciptakan ilusi kognitif bahwa pandangan mereka adalah representasi dari suara mayoritas masyarakat. Lebih jauh lagi, algoritma secara sistematis lebih memprioritaskan dan mendistribusikan konten-konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan, kekecewaan, atau kekecewaan dibandingkan analisis yang objektif terkait alasan operasional perpustakaan (Interian et al., 2023).

Penelitian (Rahmatullah, 2021) menjelaskan bahwa intervensi teknologi pada akhirnya mengubah wacana evaluasi layanan publik yang seharusnya rasional menjadi polarisasi ekstrem yang dipenuhi konflik identitas dan kelas, seperti munculnya narasi elitisme birokrasi yang berhadapan dengan kebebasan ruang publik. Kondisi ini membawa dampak yang merugikan bagi tatanan informasi masyarakat, di mana diskusi publik menjadi hilang, menyempitkan ruang untuk mencari jalan tengah antara upaya menjaga kelestarian koleksi buku dan menjamin hak akses warga. Hal ini diperkuat dengan adanya algoritma yang melahirkan krisis kepercayaan institusional; kelompok yang merasa aksesnya dibatasi menjadi semakin skeptis dan memandang kebijakan pengelola murni sebagai bentuk eksklusivitas (Qodariyah, 2025).

Berdasarkan rangkaian fenomena tersebut, terlihat jelas bahwa algoritma sistem rekomendasi media sosial bukanlah sekadar wadah komunikasi pasif, melainkan sebuah katalisator aktif yang membelah dan mengeksploitasi opini publik. Oleh karena itu, menganalisis secara mendalam pengaruh algoritma terhadap polarisasi isu kebijakan Perpustakaan Jakarta menjadi sangat krusial. Kajian ini ditujukan sebagai bentuk evaluasi sosiologi digital dalam memahami perilaku informasi masyarakat, tetapi juga menjadi landasan yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merumuskan ulang strategi komunikasi krisis, memitigasi penyebaran disinformasi, dan menjembatani kesenjangan dialog antara

birokrasi dan warga di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Menurut Fatimah et al. (2025) studi literatur (*literature review*) adalah sebuah evaluasi dan analisis kritis terhadap literatur yang sudah ada seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berfokus pada analisis konseptual mengenai mekanisme algoritma digital, perilaku masyarakat informasi, dan dinamika opini publik, yang membutuhkan sintesis dari berbagai sumber tertulis.

Data sekunder dalam penelitian ini diekstraksi dari tiga sumber utama. Pertama, literatur akademik mutakhir pada disiplin ilmu informasi dan perpustakaan. Rujukan pada kategori ini meliputi jurnal ilmiah dan buku teks yang membedah teori masyarakat informasi, perilaku informasi (*information behavior*) penggunaannya, sosiologi digital, serta mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber* pada algoritma sistem rekomendasi. Kedua, publikasi institusional dan panduan regulasi operasional yang diakses melalui portal web serta kanal digital resmi Perpustakaan Jakarta. Kategori ini mencakup dokumen kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) beserta aturan akses Jaklitra. Ketiga, arsip wacana publik dan pemberitaan media terpercaya yang mendokumentasikan linimasa polemik serta merekam jejak polarisasi sentimen masyarakat di ruang digital.

Untuk menghimpun keseluruhan literatur tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik (seperti Google Scholar, ResearchGate, dan DOAJ). Penelusuran dioperasikan menggunakan kata kunci spesifik yang merepresentasikan variabel kajian, antara lain: "algoritma media sosial", "polarisasi opini publik", "masyarakat informasi", "ruang publik digital", dan "kebijakan Perpustakaan Jakarta". Seluruh data yang terkumpul kemudian direduksi dan dievaluasi secara kritis guna menopang argumentasi pada bagian pembahasan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Menurut Preiser et al. *qualitative content analysis* adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menafsirkan makna, tema, serta pola dalam data tekstual, visual, atau audio. Proses ini diawali dengan reduksi data, yakni memilah dan menyaring informasi dari berbagai literatur yang secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang membedah mekanisme algoritma (bagaimana *filter bubble* dan *echo chamber* bekerja pada platform X, TikTok, dan Instagram) dan mengaitkannya dengan terbentuknya polarisasi narasi "pro-ketertiban" versus "pro-aksesibilitas" dalam kasus Perpustakaan Jakarta. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang mensintesiskan temuan literatur untuk merumuskan implikasi dari intervensi algoritma tersebut terhadap efektivitas sosialisasi kebijakan publik di ruang digital.

PEMBAHASAN

Transformasi Ruang Publik Masyarakat Informasi

Konsep masyarakat informasi (*information society*) menandai sebuah era di mana akses, produksi, distribusi, dan manipulasi informasi menjadi pilar utama yang menggerakkan aktivitas sosial, budaya, dan politik (Hakim et al., 2024). Warga kota metropolitan seperti DKI Jakarta merupakan representasi ideal dari masyarakat informasi ini, ditandai dengan penetrasi internet yang masif, tingginya literasi perangkat digital, dan budaya partisipasi netizen yang sangat reaktif terhadap isu-isu lokal. Dalam tatanan masyarakat seperti ini, cara warga berinteraksi dengan kebijakan negara mengalami perubahan yang radikal, khususnya terkait definisi dan fungsi "ruang publik" (Ginting et al., 2021).

Dalam tradisi sosiologi politik, filsuf Jürgen Habermas merumuskan ruang publik (*public sphere*) sebagai sebuah arena demokratis di mana warga negara dapat berkumpul secara setara, bebas dari kooptasi penguasa, untuk memperdebatkan kepentingan bersama secara rasional (Habermas, 2020). Secara historis, ruang publik ini berwujud ruang-ruang fisik seperti alun-alun kota, balai warga, kedai kopi, hingga

perpustakaan daerah. Namun, kemajuan teknologi informasi telah memicu dematerialisasi ruang publik; arena perdebatan bergeser dari dimensi fisik ke dimensi digital melalui platform media sosial seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram.

Kasus polemik kebijakan Perpustakaan Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM) menghadirkan fenomena sosiologis yang sangat unik karena memperlihatkan persinggungan langsung antara dua dimensi ruang publik yang berbeda entitas. Di satu sisi, terdapat ruang publik fisik, yakni Perpustakaan Jakarta itu sendiri, yang dibangun dan direvitalisasi sebagai wadah bagi warga untuk mengakses literatur, berinteraksi, dan berekreasi secara nyata. Di sisi lain, terdapat ruang publik digital berupa platform media sosial, yang bertransformasi menjadi arena utama bagi warga untuk mengevaluasi, mengkritik, dan mendebatkan tata kelola administrative seperti penerapan kebijakan kuota harian dan kewajiban reservasi melalui aplikasi Jaklitera yang diterapkan pada ruang publik fisik tersebut.

Transformasi ke ruang publik digital ini awalnya menjanjikan utopia demokrasi. Media sosial memberikan ilusi kesetaraan penuh; seorang mahasiswa, pekerja kerah biru, aktivis, hingga akademisi memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk mengkritik kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta. Tidak ada lagi hambatan birokrasi bagi warga untuk menyalurkan keluhannya secara langsung dan seketika (*real-time*). Namun, kajian literatur kritis menyoroti kelemahan fundamental dari transformasi ini. Berbeda dengan ruang publik fisik tradisional yang idealnya didasarkan pada diskursus yang rasional dan pencapaian mufakat, ruang publik digital beroperasi di atas infrastruktur swasta yang komersial.

Ruang maya ini tidak dirancang murni untuk memfasilitasi musyawarah demokratis, melainkan digerakkan oleh logika ekonomi perhatian (*attention economy*). Di sinilah letak kerentanan informasi masyarakat; ketika perdebatan mengenai tata kelola kota dipindahkan ke ranah media sosial, diskursus tersebut tidak lagi dikendalikan oleh argumentasi warga yang paling logis, melainkan oleh arsitektur platform itu sendiri. Pergeseran sifat ruang publik inilah yang menjadi prasyarat lahirnya polarisasi (Bhargava & Velasquez, 2021). Warga tidak lagi berdebat di sebuah "ruang kosong yang netral", melainkan di dalam sebuah sistem terprogram yang siap menyortir, membatasi, dan mengamplifikasi opini mereka sesuai dengan kepentingan mesin pencetak interaksi, yang kelak dikenal sebagai intervensi algoritma digital.

Intervensi Algoritmik: Konstruksi Filter Bubble Dan Echo Chamber

Pergeseran arena perdebatan kebijakan publik ke ruang digital membawa konsekuensi fundamental, yakni interaksi dan wacana antarwarga tidak lagi berjalan secara organik maupun alamiah. Platform media sosial seperti X (Twitter), TikTok, dan Instagram pada dasarnya beroperasi di bawah kendali model bisnis ekonomi perhatian (*attention economy*). Dalam ekosistem ini, komoditas utamanya adalah waktu dan tingkat keterlibatan (*engagement*) pengguna. Untuk memastikan pengguna bertahan selama mungkin di dalam layar, platform menggunakan algoritma sistem rekomendasi yang secara terus-menerus memilah, menyortir, dan mendistribusikan konten berdasarkan probabilitas interaksi tertinggi. Dalam konteks polemik kebijakan Perpustakaan Jakarta, intervensi algoritma ini bekerja secara masif dan terstruktur melalui dua mekanisme psikologis-teknologis utama: gelembung filter (*filter bubble*) dan ruang gema (*echo chamber*).

Penelitian Michiels et al. (2022) menjelaskan bahwa *filter bubble* merupakan mekanisme di mana algoritma mempelajari rekam jejak digital penggunaannya seperti riwayat pencarian, durasi menonton video, hingga jejak tombol suka dan bagikan untuk kemudian membangun sebuah informasi yang dipersonalisasi. Sistem rekomendasi ini secara otomatis menyaring informasi yang dianggap tidak sesuai dengan preferensi pengguna dan terus-menerus menyuplai konten yang sejalan dengan pandangan historis mereka (Areeb et al., 2023). Ketika diterapkan pada isu Perpustakaan Jakarta, algoritma ini secara sistematis memblokir masuknya perspektif alternatif. Seorang pengguna yang memiliki kecenderungan mengkritik birokrasi pemerintah akan terus-menerus disuguhkan konten berupa keluhan warga yang kehabisan kuota Jaklitera,

kerumitan antrean, atau narasi diskriminasi akses. Sebaliknya, pengguna yang memiliki rekam jejak menyukai konten arsitektur atau edukasi akan terus disuapi oleh visual estetis perpustakaan yang tertib, diiringi keluhan mengenai pengunjung yang tidak tahu aturan dan merusak fasilitas demi konten.

Dampak lanjutan dari *filter bubble* adalah terciptanya ruang gema atau *echo chamber*. Isolasi informasi yang diprogram oleh algoritma membuat pengguna perlahan-lahan terperangkap dalam kelompok sosial yang sepenuhnya homogen secara pemikiran. Penelitian Cinelli et al.(2021) menjelaskan bahwa *echo chamber* (ruang gema) adalah situasi di mana seseorang hanya terpapar pada informasi, opini, atau pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Dalam *echo chamber*, setiap opini, keluhan, maupun kemarahan mengenai pengelolaan Taman Ismail Marzuki terus-menerus dipantulkan dan divalidasi oleh sesama anggota kelompok. Validasi yang terjadi secara persisten ini menciptakan sebuah bias konfirmasi dan ilusi kognitif yang berbahaya. Individu di dalam ruang gema tersebut mulai meyakini bahwa pandangan subjektif kelompoknya adalah representasi dari suara mayoritas seluruh warga Jakarta, sekaligus menganggap pandangan kelompok lain sebagai sebuah anomali atau kesalahan yang harus diserang.

Lebih jauh lagi, algoritma sistem rekomendasi memiliki bias inheren terhadap konten-konten yang memicu respons emosional tinggi, terutama kemarahan (*outrage*) dan kekecewaan. Jika dibedah menggunakan pendekatan Sains Informasi, fenomena ini sangat relevan dengan kerangka teoretis Perilaku Informasi (*Information Behavior*) dari (Wilson, 2026). Merujuk pada konseptualisasi tersebut, kecenderungan pencarian dan konsumsi informasi di kalangan masyarakat saat ini tidak lagi murni didorong oleh kebutuhan kognitif yang otonom, melainkan telah sangat dipengaruhi oleh determinasi teknologi. Dalam konteks tata kelola digital, determinasi ini direpresentasikan oleh sistem algoritma yang secara aktif membentuk perilaku informasi (*information behavior*) penggunanya; platform memprioritaskan distribusi narasi yang reaktif, sarkastis, dan berbau konflik karena terbukti mendulang tingkat interaksi jauh lebih tinggi (Suhendra & Pratiwi, 2024).

Sintesis dari berbagai literatur akademik memperlihatkan dampak nyata dari bias algoritma ini. Kajian-kajian tersebut mengindikasikan bahwa argumen institusional seperti masalah daya tampung gedung (*carrying capacity*) dan pelestarian buku secara sistematis 'ditenggelamkan' (*shadowbanned* secara organik) oleh algoritma. Hal ini terjadi karena argumen prosedural tersebut tidak memancing reaksi emosional netizen yang dapat menguntungkan metrik platform

Konstruksi Polarisasi Publik pada Tata Kelola Perpustakaan Jakarta

Ketika mekanisme *filter bubble* dan *echo chamber* berbenturan dengan implementasi kebijakan Perpustakaan Jakarta seperti sistem reservasi daring Jaklittera, pembatasan kuota harian, dan penegakan tata tertib yang ketat, hasil yang tak terelakkan adalah terbelahnya opini publik secara tajam. Jika dibedah menggunakan kerangka teoretis Perilaku Informasi (*Information Behavior*) dari T.D. Wilson, fenomena ini menunjukkan bagaimana intervensi teknologi secara efektif melenyapkan ruang diskusi moderat atau jalan tengah. Alih-alih melahirkan perdebatan yang bernuansa mengenai bagaimana menyeimbangkan pelestarian fasilitas dan inklusivitas akses, arsitektur digital justru mendikte perilaku konsumsi informasi masyarakat. Platform mengonstruksi dua gelembung narasi paralel yang sepenuhnya terisolasi satu sama lain, murni berdasarkan rekam jejak digital masing-masing pengguna. Konstruksi pembelahan narasi tersebut dapat dipetakan secara terstruktur sebagai berikut:

Tabel 1: Pemetaan Konstruksi Gelembung Narasi pada Isu Kebijakan Perpustakaan Jakarta

Aspek Kajian	Pro-Ketertiban	Pro-Aksesibilitas
Gelembung Filter (Paparan Konten)	Video/foto pengunjung yang berisik, merusak fasilitas, atau mengeksploitasi area baca hanya untuk sesi foto <i>aesthetic</i> .	Bukti visual antrean panjang, warga yang ditolak masuk karena kuota habis, serta tangkapan layar galat (<i>error</i>) aplikasi Jaklittera.
Ruang Gema	Menganggap aturan ketat mutlak	Menganggap birokrasi pemerintah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

(Validasi Opini)	dipertahankan karena tingkat kedisiplinan dan literasi masyarakat dinilai belum siap.	daerah bertindak elitis dan menjadikan jargon "ketertiban" sebagai alasan merampas hak publik.
Sentimen Dominan	Frustrasi dan kelelahan komunal terhadap ketidakdisiplinan sesama warga (<i>civic fatigue</i>).	Kemarahan terhadap represi administratif dan kekakuan sistem birokrasi institusi pemerintah.

Sumber: Hasil sintesis literatur, diolah oleh peneliti (2026)

Di satu sisi, algoritma membangun sebuah lingkungan informasi yang secara konsisten memvalidasi kelompok pro-ketertiban. Merujuk pada model Wilson, fase penerimaan dan penemuan informasi (*information encountering*) dalam kelompok ini telah direkayasa sepenuhnya oleh sistem. Pengguna yang terperangkap dalam gelembung ini terus-menerus disugahi konten visual yang merekam perilaku buruk pengunjung seperti yang tercantum pada Tabel 1. Paparan konten yang disaring oleh *filter bubble* ini memperkuat narasi tunggal bahwa aturan ketat dan sistem kuota adalah sebuah keharusan mutlak, didasari oleh asumsi bahwa masyarakat belum memiliki kesiapan budaya untuk merawat fasilitas publik bermutu tinggi. Sentimen dominan yang menggerakkan *echo chamber* ini adalah kelelahan sipil (*civic fatigue*), yakni rasa frustrasi komunal terhadap ketidakdisiplinan sesama warga yang pada akhirnya menjustifikasi kontrol birokrasi yang kaku oleh pihak pengelola (Demirci, 2025).

Pada kutub yang berseberangan, algoritma merancang lingkungan komunikasi yang sama kuatnya bagi kelompok pro-aksesibilitas. Dalam semesta digital yang paralel ini, perilaku informasi pengguna tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan kognitif yang otonom, melainkan dideterminasi oleh sistem rekomendasi yang mengamplifikasi narasi-narasi marjinalisasi dan pembatasan hak. Melalui mekanisme *filter bubble*, pengguna dibanjiri oleh berbagai konten yang menceritakan pengalaman buruk terkait hambatan sistemik. Dominasi informasi semacam ini menebalkan keyakinan bahwa birokrasi pemerintah daerah bertindak elitis dan diskriminatif. Sentimen yang terbangun menganggap bahwa jargon "ketertiban" hanyalah kedok untuk membatasi ruang publik. Sentimen dominan yang dipupuk oleh algoritma di kutub ini adalah kemarahan, di mana sistem digital dipandang bukan sebagai alat manajemen kapasitas, melainkan sebagai tembok pemisah kelas sosial.

Dampak paling destruktif dari konstruksi dua gelembung ini, dalam tinjauan sains informasi, adalah terjadinya disfungsi pada perilaku informasi yang berujung pada terciptanya kebutaan berlapis di tengah masyarakat informasi. Kelompok pro-ketertiban menjadi sepenuhnya tidak peka terhadap adanya kesenjangan literasi digital masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan nyata saat harus berhadapan dengan birokrasi aplikasi. Sebaliknya, kelompok pro-aksesibilitas menjadi sangat buta terhadap argumen institusional dan prosedural terkait daya dukung bangunan (*carrying capacity*) serta ancaman nyata berupa degradasi kualitas literatur akibat kelebihan pengunjung. Pada titik ini, algoritma sistem rekomendasi terbukti tidak sekadar merefleksikan perbedaan pendapat, melainkan bertindak sebagai arsitek konflik yang secara aktif mengubah isu tata kelola fasilitas kota menjadi pertarungan wacana yang sengit.

KESIMPULAN

Transformasi ekosistem di era masyarakat informasi telah memicu pergeseran fundamental epistemologis, di mana arena diskursus mengenai tata kelola kota tidak lagi berpusat di ruang fisik, melainkan bermigrasi sepenuhnya ke dimensi digital dan mengubah pola perilaku informasi (*information behavior*) penggunaannya. Dalam konteks polemik kebijakan pengelolaan Perpustakaan Jakarta, platform media sosial terbukti tidak beroperasi sebagai medium netral atau ruang publik deliberatif yang ideal layaknya konsep tradisional. Sebaliknya, ruang maya tersebut bekerja di bawah hegemoni logika ekonomi perhatian (*attention economy*), di mana intervensi teknologi melalui algoritma sistem rekomendasi bertindak sebagai aktor non-manusia yang mengonstruksi, mengontrol, dan mendikte sirkulasi wacana publik. Algoritma ini memiliki kuasa penuh untuk menentukan batas-batas informasi apa yang dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

diakses oleh individu, menjadikannya instrumen determinisme teknologi yang secara sistematis mereduksi diskursus kebijakan publik menjadi sekadar komodifikasi konflik.

Mekanisme dominasi ruang digital ini dieksekusi melalui dua struktur arsitektur algoritma yang mengisolasi kognisi penggunaannya, yakni gelembung filter (*filter bubble*) dan ruang gema (*echo chamber*). Alih-alih memfasilitasi pertukaran gagasan lintas perspektif, algoritma justru melakukan segregasi kognitif secara masif. Sistem ini melacak dan memetakan rekam jejak digital individu, untuk kemudian menyingkirkan perspektif alternatif dan membanjiri beranda pengguna dengan informasi yang hanya sejalan dengan keyakinan historis mereka. Algoritma secara inheren memprioritaskan amplifikasi narasi-narasi yang provokatif dan memicu tegangan emosional tingkat tinggi, karena sentimen semacam itulah yang paling efektif dalam menahan retensi perhatian pengguna. Akibatnya, argumen institusional dan alasan prosedural tata kelola kota secara sistematis ditenggelamkan (*shadowbanned*), dan pertukaran wacana berubah menjadi sirkulasi emosi belaka.

Implikasi langsung dari intervensi teknologis ini adalah terciptanya polarisasi biner yang membelah masyarakat ke dalam dua gelembung narasi paralel yang saling berbenturan tanpa pernah menemukan titik temu. Di satu kutub, algoritma memelihara dan memvalidasi kelompok pro-ketertiban dengan narasi-narasi ketidakdisiplinan warga yang secara berulang memicu kelelahan sipil (*civic fatigue*). Wacana di dalam gelembung ini mengonstruksi pembenaran absolut atas kontrol birokrasi yang kaku. Sementara itu, pada kutub yang berseberangan, algoritma mereproduksi ruang perlawanan bagi kelompok pro-aksesibilitas. Wacana yang diamplifikasi di kutub ini berfokus pada pengalaman marginalisasi, yang secara terus-menerus memupuk sentimen kemarahan kolektif terhadap represi administratif pemerintah daerah. Konstruksi realitas ganda ini pada akhirnya memicu kebutaan struktural yang berlapis; satu pihak menjadi sepenuhnya abai terhadap realitas kesenjangan literasi digital kelas menengah ke bawah, sementara pihak lain menolak argumen institusional terkait daya dukung bangunan (*carrying capacity*) fasilitas literatur kota.

Sebagai konklusi, fenomena ini membuktikan bahwa polarisasi opini yang mengitari isu Perpustakaan Jakarta bukanlah representasi dari dinamika perdebatan publik yang organik. Sebaliknya, diskursus administratif tersebut telah terdistorsi menjadi arena segregasi sosial akibat intervensi sistem algoritmik. Bagi kajian keilmuan sistem informasi, realitas ini menyumbangkan pemahaman krusial: tantangan tata kelola kebijakan publik di era kontemporer tidak lagi sebatas pada substansi regulasinya, melainkan pada bagaimana institusi mampu menavigasi arsitektur sistem informasi digital sebuah ruang yang secara inheren cenderung mengapitalisasi konflik dan merawat fragmentasi di tengah masyarakat informasi.

REFERENSI

- Areeb, Q. M., Nadeem, M., Sohail, S. S., Imam, R., Doctor, F., Himeur, Y., Hussain, A., & Amira, A. (2023). Filter bubbles in recommender systems: Fact or fallacy—A systematic review. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 13(6), e1512.
- Arum, A. P., & Marfianti, Y. (2021). Pengembangan perpustakaan digital untuk mempermudah akses informasi. *Information Science and Library*, 2(2), 92–100.
- Bhargava, V. R., & Velasquez, M. (2021). Ethics of the attention economy: The problem of social media addiction. *Business Ethics Quarterly*, 31(3), 321–359.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118.
- Demirci, M. R. (2025). The Invisible Crisis of Democracy: A Conceptual Inquiry into Civic Fatigue. *International Journal of Management and Administration*, 10(19), 1–18.
- Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitrisia, A. (2025). Literatur Rievew dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 41–48.
- Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi digital sebagai wujud

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2).
- Habermas, J. (2020). The public sphere: An encyclopedia article. In *Critical theory and society* (pp. 136–142). Routledge.
- Hakim, H. I., Polin, I., & Irwansyah, I. (2024). Peran media sosial Instagram sebagai media informasi dalam masyarakat 5.0. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 287–300.
- Interian, R., G. Marzo, R., Mendoza, I., & Ribeiro, C. C. (2023). Network polarization, filter bubbles, and echo chambers: an annotated review of measures and reduction methods. *International Transactions in Operational Research*, 30(6), 3122–3158.
- Karya, B., & Rahman, F. (2026). DINAMIKA MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK DI ERA DIGITAL. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 8(1), 70–75.
- Michiels, L., Leysen, J., Smets, A., & Goethals, B. (2022). What are filter bubbles really? A review of the conceptual and empirical work. *Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*, 274–279.
- Qodariyah, L. (2025). Media Digital dan Pelestarian Informasi Untuk Menjamin Akses Informasi di Era Teknologi: Digital Media and Information Preservation to Ensure Access to Information in the Technological Era. *Library Archive and Tecnology Journal*, 1(1), 37–48.
- Rahmatullah, T. (2021). Teknologi persuasif: Aktor penting media sosial dalam mengubah sikap dan perilaku pengguna. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 60–78.
- Rhodes, S. C. (2022). Filter bubbles, echo chambers, and fake news: How social media conditions individuals to be less critical of political misinformation. *Political Communication*, 39(1), 1–22.
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 1(2), 293–315.
- Wilson, T. D. (2026). Modelling the impact of generative artificial intelligence on information behaviour research. *Journal of Documentation*, 82(7), 376–395.